Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.
Dr. Teuku Rahman, S.H., M.H.

PERAN KEJAKSAAN *Dalam Penyelesaian* PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF



PERAN KEJAKSAAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF

Penulis:
Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum.
Dr. Teuku Rahman, S.H., M.H.

Editor:
M. Aris Munandar, S.H., M.H.

PENERBIT KBM INDONESIA

PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF

Copyright @2025 by Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum.dkk

All rights reserved



QRCBN | 62-1307-8765-399
14 x 21 cm, viii + 63 halaman
Cetakan ke-1, Maret 2025

Penulis | Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum.
Dr. Teuku Rahman, S.H., M.H.
Desain Sampul | Aswan Kreatif
Tata Letak | Eka Alivia
Editor Naskah | M. Aris Munandar, S.H., M.H.

Diterbitkan Oleh:
PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)
NO. IKAPI 279/JTI/2021
Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)
081357517526 (Tlpn/WA)
Website | penerbitkbm.com | www.penerbitbukumurah.com
Email | naskah@penerbitkbm.com | toko.penerbitbukujogja.com
Youtube | Penerbit KBM Sastrabook
Instagram | @penerbit.kbm | @penerbitbukujogja

Isi Buku Diluar Tanggungjawab Penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di
DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena berisiko
sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah



PENGANTAR PENULIS

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis berharap kehadiran buku ini sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada aspek represif, tetapi juga harus mampu memberikan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat. Sejalan dengan adagium "Ubi societas, ibi ius", di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, maka hukum harus selalu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial demi tercapainya keadilan yang lebih luas.

Konsep restorative justice yang dibahas dalam buku ini merupakan paradigma progresif dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini menekankan pemulihan hak-hak korban, tanggung jawab pelaku, serta keseimbangan dalam pemidanaan. Sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum yang lebih humanis, Kejaksaan Republik Indonesia telah berperan aktif dalam menerapkan pendekatan ini guna menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga berlandaskan moral dan sosial. Sebagaimana dikatakan

oleh Rudolf von Jhering, "Tujuan hukum adalah perdamaian, dan sarana untuk mencapainya adalah perjuangan", maka restorative justice adalah bentuk perjuangan hukum dalam merajut harmoni di tengah masyarakat.

Lebih jauh, penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana oleh Kejaksaan menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk pemidanaan konvensional. Alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi penal, musyawarah, serta kesepakatan antara korban dan pelaku menjadi pendekatan yang semakin relevan dalam masyarakat yang berorientasi pada rekonsiliasi. Dengan adanya prinsip keadilan korektif, rehabilitatif, dan restitutif, maka mekanisme hukum dapat semakin berdaya guna, sebagaimana adagium "Fiat justitia ruat caelum", keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh.

Terakhir, saya berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat luas dalam memahami dinamika penegakan hukum modern, khususnya terkait dengan ganti rugi dan rehabilitasi dalam KUHP Nasional. Dengan semangat profesionalisme, integritas, dan keadilan, kita dapat terus mengupayakan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman dan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Semoga buku ini memberikan wawasan baru serta kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Makassar, 5 Februari 2025

Penulis

ttd.

Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.



PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku ini yang membahas aspek penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya mengenai konsep *Restorative Justice* dan penerapannya oleh Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam memahami peran hukum sebagai sarana mencapai keadilan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pemulihan bagi korban dan pelaku. Sebagaimana adagium hukum *"Summum ius, summa iniuria"*, hukum yang diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan nilai keadilan dapat justru menimbulkan ketidakadilan yang lebih besar.

Dalam kajian ini, kami membahas teori penegakan hukum sebagai dasar konseptual dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Prinsip *Restorative Justice* menjadi sorotan

utama sebagai pendekatan yang menekankan pemulihan daripada penghukuman semata. Hal ini sesuai dengan paradigma hukum modern yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku kejahatan.

Selanjutnya, buku ini menguraikan bagaimana Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum menerapkan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pidana. Pendekatan ini menjadi solusi alternatif bagi kasus-kasus tertentu yang memungkinkan penyelesaian yang lebih berkeadilan dan bermanfaat bagi semua pihak. Selain itu, aspek ganti rugi dan rehabilitasi dalam KUHP Nasional turut dibahas sebagai instrumen pemulihan yang semakin diperkuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia, serta membuka wawasan baru dalam mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan inklusif. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia akademik dan praktik hukum. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Makassar, 5 Februari 2025
Penulis

ttd
Dr. Teuku Rahman, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

Pengantar Penulis
Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum..... i
Pengantar Penulis
Dr. Teuku Rahman, S.H., M.H. v
Daftar Isi.....vii

PROLOG 1
TEORI PENEGAKAN HUKUM.....9
PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* 13
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA.....25
EPILOG 49
DAFTAR PUSTAKA.....51

Riwayat Hidup Penulis.....55
Riwayat Hidup Editor.....61



DAFTAR PUSTAKA

Arif, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Al' Adl*, Volume X Nomor 2 (2018).

Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2012.

Fajardin, Mohammad Atik. "*Restorative Justice Kejaksaan Dinilai Perkuat Sistem Peradilan Pidana*". Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/669047/13/restorative-justice-kejaksaan-dinilai-perkuat-sistem-peradilan-pidana-1643266899

Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2005.

Jatmiko, Gunawan. "Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 24 Nomor 2 (2006).

Maryanto. "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum". *Jurnal Ilmiah CIVIS,* Volume II, No 2, Juli 2012, tanpa halaman. Sumber:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1uaqE1IrhAhWRiHAKHQ8wCzMQFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.upgris.ac.id%2Findex.php%2Fcivis%2Farticle%2Fdownload%2F457%2F411&usg=AOvVaw3pPlwTAFSw ns7UKvWKtX_w

Maulana, Aby. "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargainging Di Beberapa Negara". *Jurnal Cita Hukum*, Volume II Nomor 1 (2015).

Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.

Primadhyta, Safyra. "*Indeks Negara Hukum RI 2021 Turun, Peringkat 68 Dari 139 Negara*". Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211224021109-12-738077/wjp-indeks-negara-hukum-ri-2021-turun-peringkat-68-dari-139- negara

Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung; Angkasa. 1980.

Rosidah, Nikmah. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister. 2014.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Sukardi. "*Penerapan Prinsip-Prinsip Restorative Justice Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana*". Sumber: https://investor.id/opinion/penerapan

-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana

Tongat. "Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42 Nomor 4 (2013).

Wahid, Eriyantouw. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti. 2009.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009.

Zulfa, Eva Achjani. *Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Jusctice*. Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta. 2011.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Data Pribadi

1. Nama : Dr. Teuku Rahman, S.H., M.H.
2. Pangkat : Jaksa Utama Muda
3. Nip : 197407161998031005
4. Tempat Lahir : Pati, Jawa Tengah
5. Tanggal Lahir : 16 Juli 1974
6. Agama : Islam
7. Suku Bangsa : Aceh-Sunda
8. Jabatan : Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
9. Satker / Kesatuan: Kejaksaan Ri

Pendidikan Umum

1. Sd : 1987
2. Smp : 1990
3. Sma : 1993
4. S-1 : 1997
5. S-2 : 2002
6. S-3 : 2020

Riwayat Kepangkatan

1. Yuana Wira Tu : 1998/1999
2. Ajun Jaksa : 2003
3. Jaksa Pratama : 2006
4. Jaksa Muda : 2009
5. Jaksa Madya : 2013
6. Jaksa Utama Pratama : 2016
7. Jaksa Utama Muda : 2021

Riwayat Jabatan

1. Kepalasub Seksi Orang Dan Harta Benda Pidum, Dki Jkt : 2003
2. Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidsus Kejari Jakbar : 2005
3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kalianda : 2006
4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Tangerang : 2006
5. Kepala Sub Bagian Jenjang Karir, Biro Kepegawaian : 2008

6. Kepala Seksi Tindak Pidana Terhadap Oharda, Jabar : 2010
7. Kepala Seksi Ii : Asisten Intelijen, Kejati Dki Jkt: 2013
8. Koordinator Di Kejati Bengkulu : 2013
9. Kepala Kejaksaan Negeri Rengat, Riau : 2014
10. Asisten Pengawasan Kejati Jambi : 2016
11. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur : 2017
12. Asisten Intelijen Kejati Dki Jakarta : 2019
13. Koordinator Intelijen, Jam Intelijen Kejagung: 2021
14. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat: 2022
15. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan : 2024

Riwayat Tanda Jasa

1. Satyalancana Karya Satya X Tahun : 2008
2. Satyalancana Karya Satya Xx Tahun : 2018



Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum, adalah seorang ahli hukum dan jaksa yang memiliki rekam jejak panjang dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Mataram pada tahun 1994, kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2001 dengan predikat *cum laude*. Dedikasi penulis terhadap ilmu hukum berlanjut hingga tingkat doktoral di Universitas Padjadjaran, yang juga diraihnya dengan predikat cum laude pada tahun 2012. Puncak pengakuan akademiknya tercapai pada tahun 2022 ketika penulis dikukuhkan sebagai Profesor Honoris Causa di Universitas Pendidikan Indonesia.

Karier profesionalnya dimulai dengan berbagai jabatan di lingkungan Kejaksaan, di antaranya sebagai Koordinator pada Aspidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Sumber, dan Kepala Kejaksaan Negeri Stabat di Sumatera Utara. Penulis juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumatera Utara, serta Asisten Khusus

Jaksa Agung RI. Karir penulis terus menanjak hingga menjadi Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dan Jawa Barat. Pada Februari 2023, Penulis diangkat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM, sebelum akhirnya dipercaya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada Juni 2024.

Di bidang akademik dan keilmuan, penulis telah menulis berbagai buku yang berkontribusi besar dalam perkembangan hukum di Indonesia. Beberapa karyanya yang terkenal meliputi Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Aktivitas Pasar Modal di Indonesia (2010), Dimensi Koruptif (Pejabat) Publik: Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (2016), Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi (2018), Deferred Prosecutions Agreement dalam Kejahatan Bisnis (2019), serta Piercing the Corporate Veil: Dinamika Regulasi dan Praktik Peradilan (2023). Penulis juga menulis tentang hukum pidana militer dalam Hukum Pidana Militer Kontemporer (2020) dan Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (2020).

Selain itu, penulis aktif dalam berbagai organisasi dan forum internasional. Penulis pernah menghadiri pertemuan di International Association of Prosecutors, ASEAN-China Legal Forum, hingga Benchmarking Study untuk perencanaan pembangunan nasional di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Norwegia, dan Swiss. Kepiawaian penulis dalam kepemimpinan juga diakui dengan berbagai penghargaan, termasuk sebagai peserta terbaik dalam berbagai pendidikan kepemimpinan nasional dan mendapatkan berbagai apresiasi dari pemerintah dan lembaga independen atas kontribusinya dalam pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Sebagai seorang akademisi, praktisi hukum, dan pemimpin di Kejaksaan, penulis terus berkontribusi dalam pengembangan hukum di Indonesia, baik dalam ranah akademik maupun dalam praktik hukum yang lebih luas.



RIWAYAT HIDUP EDITOR



M. Aris Munandar, S.H., M.H., lahir di Bulukumba pada tanggal 11 September 1997. Pendidikan Editor yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bulukumba" tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bulukumba" tahun 2009-2012, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bulukumba" tahun 2012-2015. Editor memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2019, dan gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021.

Saat ini Editor merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain aktif sebagai pendidik, Editor juga intens melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Editor terlibat aktif sebagai Pengurus Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UKBH FH UH), Pengurus Masyarakat Hukum Pidana dan

Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Peduli Bangsa Indonesia (LBH PBI). Editor pernah aktif di beberapa organisasi internal dan eksternal kampus lainnya semasa masih menyandang status mahasiswa, di antaranya Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Unhas (LP2KI FH UH), Lembaga Dakwah Asy-Syari'ah Fakultas Hukum Unhas (MPM FH UH), Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba Unhas (KKMB FH UH), Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Unhas (LeDHak UH), Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi Unhas (IKAB UH), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan organisasi lainnya.

Karya yang pernah dipublikasikan dalam bentuk buku oleh Editor yaitu:

1. Menilik Konsepsi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keadilan (Suatu Refleksi Teoretis) tahun 2019;
2. Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dari Substansi Menuju Koherensi) tahun 2019;
3. Aspek Hukum Perkawinan dan Poligami tahun 2019;
4. Narkotika, Prinsip Penjatuhan Pidana dan Ketentuan Pidana Minimum Khusus (Suatu Kajian Teoretis, Normatif dan Kasuistik) tahun 2019;
5. Tindak Pidana Korupsi (Kajian Pembayaran Uang Pengganti Korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa) tahun 2020;
6. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Non-Litigas) tahun 2020;
7. Akhir Itu Tiada tahun 2020;

8. Berguguran di Ranting Harapan (Antologi Puisi Kontributor Terpilih Lomba Cipta Puisi yang Diselenggarakan oleh Penerbit Jendela Sastra Indonesia) tahun 2020;
9. Berjuang Melawan Corona (Kumpulan Tulisan oleh Penerbit Litera dalam Kegiatan "Ajakan Menulis Pengalaman Kuat Melawan Corona") tahun 2020;
10. Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi (Suatu Refleksi, Teoretis, dan Empiris) tahun 2021;
11. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Merintangi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Kota Makassar tahun 2021;
12. Hukum Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022;
13. Aspek Hukum Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tahun 2023;
14. Jejak Pemikiran tahun 2023;
15. Eksaminasi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai tahun 2023;
16. Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tahun 2023;
17. Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Kedaruratan Kesehatan tahun 2024.

Editor juga aktif menulis jurnal, opini di media online maupun cetak, menjadi editor pada beberapa buku, menjadi reviewer jurnal, serta mengikuti berbagai pelatihan. Selain itu, editor juga sering menjadi editor pada beberapa buku.

Editor dapat dihubungi melalui *e-mail*:
m.arismunandar@unhas.ac.id